



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2009, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Sleman yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program penataan peraturan perundang-undangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2009 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu. APBD Tahun anggaran 2009 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 955.033.225.051,99
2. Belanja	<u>Rp 1.139.002.482.963,58</u>
Defisit	Rp (183.969.257.911,59)
3. Pembiayaan:	
a. Pembiayaan penerimaan	Rp 213.907.757.911,59
b. Pembiayaan pengeluaran	<u>Rp 29.938.500.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 183.969.257.911,59

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.



- b. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial.
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
- e. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi
- f. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah
- h. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah tentang pendapatan daerah.

Pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pungutan pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada masyarakat. Pemungutan pajak didasarkan pada asas keadilan dan kewajaran, yang mencakup kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi konsep kemampuan bagi wajib pajak/retribusi untuk membayar kewajiban pajak/retribusi disesuaikan dengan kemampuannya. Untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut, pemerintah daerah memberlakukan tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah diupayakan melalui pendataan, pemantauan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan serta penertiban kepada wajib pajak dan wajib retribusi secara intensif. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan tahun anggaran 2009 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Evaluasi PAD.
- b. Penetapan Pajak Daerah.



- c. Analisis hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pajak daerah.
- d. Penyediaan surat ketetapan pajak PPJU.
- e. Pendaftaran calon wajib pajak dan pemantauan wajib pajak daerah.
- f. Pemeriksaan wajib pajak daerah.
- g. Pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah.
- h. Pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah.
- i. Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan Kaliurang.
- j. Bagi hasil pajak.
- k. Pengelolaan PBB,
- l. Pembinaan dan operasional Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- m. Pengelolaan titik reklame,
- n. Penagihan pajak daerah,
- o. Forum Komunikasi pengelola pendapatan.
- p. Pemantauan wajib pajak daerah.
- q. Intensifikasi pajak reklame.
- r. Pembinaan wajib pajak daerah.
- s. Pengembalian PHR.

Program tersebut diatas dilakukan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan intensifikasi serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi

Selain upaya –upaya tersebut diatas juga dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset –aset daerah khususnya yang berpotensi dalam rangka peningkatan PAD melalui kegiatan :

- a. Sensus Aset daerah (lanjutan);
- b. Pengkajian dan pemanfaatan aset daerah;
- c. Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah;
- d. Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- e. Penghapusan aktiva tetap.

Kebijakan anggaran pendapatan pada tahun 2009 difokuskan pada pencapaian target pendapatan daerah untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan daerah tahun 2009 sebesar **Rp955.033.225.051,99** dapat direalisasikan sebesar **Rp996.351.421.460,84** atau **104,33 %** dari target. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2009 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2008 sebesar Rp946.476.028.092,43 mengalami peningkatan sebesar Rp49.875.393.368,41 atau **5,27 %**.

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Asli Daerah	128.916.163.263,99	157.399.974.580,84	122,09
a.	Pajak daerah	56.350.000.000,00	71.044.731.106,66	126,08
b.	Retribusi daerah	49.556.793.680,00	54.719.438.555,90	110,42
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.839.600.803,99	9.973.164.266,92	101,36
d.	Lain-lain PAD yang sah	13.171.758.780,00	21.662.640.651,36	164,46
2.	Dana Perimbangan	724.463.105.588,00	717.703.169.280,00	99,07
a.	Bagi hasil pajak dan bukan pajak	100.629.327.588,00	93.869.391.280,00	93,28
b.	Dana alokasi umum	587.857.778.000,00	587.857.778.000,00	100
c.	Dana alokasi khusus	35.976.000.000,00	35.976.000.000,00	100
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	101.651.966.200,00	121.248.277.600,00	119,28
a	Hibah	1.020.770.000,00	120.770.000,00	11,83
b	Dana darurat	0,00		
c	Dana bagi hasil pajak	68.062.048.800,00	68.062.049.000,00	100



1	2	3	4	5
d	Bantuan keuangan dari Propinsi	16.492.000.000,00	16.492.000.000,00	100
e	Pendapatan dari Cukai Tembakau	1.182.700.400,00	1.285.611.600,00	108,70
f	Dana Penguatan Desentralisasi Fiscal dan Percepatan Pembangunan Daerah .	14.894.447.000,00	14.894.447.000,00	100
	Tunjangan Guru PNS	0,00	20.393.400.000,00	
	Jumlah	955.033.225.051,99	996.351.421.460,84	104,33

Sumber: BPKKD

3. Permasalahan dan Solusi

Pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan. Bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari DAU. Upaya peningkatan pendapatan dana transfer dari pusat terasa sulit dilakukan karena formulasi penentuan besarnya dana transfer bersifat *given*. Dibanding dengan tahun anggaran 2008 pendapatan DAU mengalami penurunan dari Rp592.594.528.000,00 menjadi Rp587.857.778.000,00 atau turun sebesar Rp4.736.750.000,00 atau 0,81% namun pendapatan DAK mengalami kenaikan dari Rp10.151.000.000,00 menjadi Rp35.976.000.000,00 atau naik sebesar Rp25.825.000.000,00 atau 254,41%.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi optimalisasi tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka



meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang ditempuh adalah:

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak untuk membayar pajak serta penegakan peraturan perundangan perpajakan. Solusi yang dilakukan dengan peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melalui kegiatan :
 - Sosialisasi dan pemberian kemudahan dalam pemungutan pajak dengan cara mendatangi wajib pajak;
 - Penagihan pajak secara persuasif;
 - Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
 - Forum komunikasi pengelola pendapatan;
 - Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah.
- b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak belum sesuai dengan potensi. Solusi yang dilakukan dengan peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi dengan instansi lain yang terkait seperti Forum Komunikasi pengelola PAD, Asosiasi PPAT Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restaurant dan lain-lain.
- c. Dalam Tahun anggaran 2009 berdasarkan NPPH No:003/PK/2009 tanggal 3 September 2009 seharusnya Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat hibah untuk kegiatan *Basic Education Capacity-Trust Fund* (BEC-TF) sebesar Rp900.000.000,00. Namun sampai akhir tahun anggaran 2009 dana hibah tersebut tidak terealisasi meskipun Pemkab Sleman telah mengajukan surat untuk permintaan penyaluran hibah tahap I ke Direktur Jenderal Perimbangan Dept keuangan dengan surat No 421/02367 tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp565.759.500,00. Hal



tersebut terjadi karena permasalahan intern di Departemen Keuangan. Upaya yang ditempuh adalah dengan tetap melakukan koordinasi ke Departemen Keuangan agar dana hibah yang belum terelalisir tersebut dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2009 kebijakan yang dilaksanakan melalui peningkatan belanja diprioritaskan untuk :

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- b. Revitalisasi pertanian dan kehutanan.
- c. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- e. Pengembangan kawasan strategis, peningkatan pengelolaan.
- f. Lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
- g. Peningkatan pendapatan daerah.
- h. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

Berbagai prioritas tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2005-2010 serta RKPD tahun 2009, yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan Umum belanja daerah tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

1) Belanja Gaji

- Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan accres gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;



2) Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3) Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

4) Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

5) Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

6) Bagi Hasil

Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

7) Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

8) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).



b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

c. Kebijakan berdasarkan Urusan Wajib

1) Pendidikan

- a) Mempertahankan Wajar 9 tahun dan merintis Wajar 12 tahun serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mencapai pendidikan lebih lanjut.
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan.
- c) Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan .
- e) Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis.
- f) Mewujudkan lembaga pendidikan, organisasi pemuda dan olahraga, serta partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam rangka pembangunan bidang pendidikan.
- g) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- h) Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

2) Kesehatan

- a) Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- b) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Sleman.
- c) Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemberdayaan kader kesehatan dan kemitraan dengan *stakeholders*.



- d) Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan.
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum
 - a) Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang melalui peran serta masyarakat.
 - b) Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air melalui peran serta masyarakat untuk menjaga bendung, saluran dan prasarana irigasi berfungsi baik.
 - c) Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana.
 - d) Memelihara dan meningkatkan kualitas gedung dan fasilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- 4) Perumahan .
 - a) Memelihara, meningkatkan kualitas, dan pemerataan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman.
 - b) Peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan kelayakan kesehatan dan teknis bangunan.
- 5) Penataan Ruang
 - a) Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan peran serta masyarakat.
 - b) Meningkatkan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan efisiensi penggunaan ruang.
- 6) Perencanaan Pembangunan
 - a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan *stakeholders*.
 - b) Meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

7) Perhubungan

Memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan.

8) Lingkungan Hidup

- a) Menjaga dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat.
- b) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.

9) Pertanahan

- a) Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai rencana tata ruang.
- b) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas.
- b) Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera



c) Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

d) Meningkatkan kuantitas peserta KB.

13) Sosial

a) Pemberdayaan dan fasilitasi keluarga miskin.

b) Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama.

c) Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

d) Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan penyalahgunaan napza.

14) Ketenagakerjaan

a) Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja.

b) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja.

c) Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja.

d) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja.

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota.

b) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

16) Penanaman Modal

a) Meningkatkan investasi melalui promosi.

b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.



17) Kebudayaan

- a) Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta.
- b) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

18) Kepemudaan dan Olah raga

- a) Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.
- b) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olah raga melalui peran serta masyarakat.

19) Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

- a) Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
- b) Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.
- c) Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.
- d) Peningkatan intensitas pendampingan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a) Meningkatkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah.
- c) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Meningkatkan efektivitas birokrasi.
- e) Meningkatkan efektivitas kerjasama.



- f) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
- g) Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah.
- h) Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- i) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah.
- j) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- k) Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.
- l) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah Desa.

21) Ketahanan Pangan

- a) Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras serta pengembangan pangan alternatif.
- b) Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana irigasi.
- c) Mengoptimalkan sistem dan distribusi sarana produksi pertanian.

22) Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Penguatan kelembagaan masyarakat.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

23) Statistik

- a) Meningkatkan kuantitas dan akurasi data.
- b) Meningkatkan akses informasi ke seluruh *stakeholders*.

24) Kearsipan

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip.
- b) Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

25) Komunikasi & Informatika

- a) Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat.
- b) Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi.



- c) Meningkatkan sarana dan prasarana data center.
- d) Mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui *e-gov*.
- e) Mengembangkan sistem informasi secara terintegrasi, standar dan terpadu dalam rangka *e-gov*.
- f) Mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi terapan dan informasi kepada masyarakat.

26) Perpustakaan

- a) Meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
- c) Meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- d) Meningkatkan budaya baca masyarakat.

d. Kebijakan berdasarkan Urusan Pilihan

1) Pertanian

- a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan dan ternak.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak.
- c) Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

2) Kehutanan

- a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani hutan dan kebun.
- b) Meningkatkan peran Kebun Bibit Desa sebagai penyedia bibit tanaman penghijauan.
- c) Meningkatkan fungsi hutan di lereng Merapi sebagai wilayah penyangga air (*catchment area*).
- d) Meningkatkan pengelolaan pasca panen perkebunan dan kemitraan.



- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan.
 - b) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.
- 4) Pariwisata
 - a) Meningkatkan daya tarik dan daya saing obyek wisata
 - b) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.
- 5) Kelautan dan Perikanan
 - a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan.
 - b) Meningkatkan peran Balai Benih Ikan.
 - c) Meningkatkan produksi komoditas perikanan.
- 6) Perdagangan
 - a) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional.
 - b) Meningkatkan perlindungan konsumen.
 - c) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.
- 7) Industri
 - a) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM.
 - b) Meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.
- 8) Ketramigrasian
 - a) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran.
 - b) Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target belanja daerah tahun 2009 sebesar **Rp1.139.002.482.963,58** terealisasi **Rp1.016.042.827.292,37** atau sebesar **89,20 %**. Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2008 sebesar



Rp906.618.990.410,50 berarti terjadi kenaikan sebesar Rp109.423.836.881,87 atau 12,07%.

Target dan realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	738.515.507.832,57	674.239.941.927,30	91,30
a.	Belanja Pegawai	599.980.207.667,00	556.313.854.100,82	92,72
b.	Belanja Bunga	144.000.000,00	102.458.156,61	71,15
c.	Belanja Subsidi	10.800.000.000,00	10.188.094.637,00	94,33
	Belanja Hibah	19.411.418.350,00	19.401.427.758,00	99,95
d.	Belanja Bantuan Sosial	59.779.802.439,00	46.289.206.623,30	77,43
e.	Belanja Bagi hasil kepada Prop/ Kab./ Kota dan Pemerintah desa	20.523.769.067,40	20.517.574.208,00	99,97
f.	Belanja Bantuan keuangan	21.466.635.000,00	19.472.130.000,00	90,71
g.	Belanja Tak Terduga	6.409.675.309,17	0,00	0,00
2.	Belanja Langsung	400.486.975.131,01	343.758.081.808,64	85,84
a.	Belanja Pegawai	89.880.838.912,00	80.293.674.749,00	89,33
b.	Belanja Barang dan Jasa	173.626.240.022,00	147.599.744.504,64	85,01
c.	Belanja Modal	136.979.896.197,01	115.864.662.555,00	84,59
	Total	1.139.002.482.963,58	1.016.042.827.292,37	89,20

Sumber: BPKKD

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan tantangan tahun 2009 antara lain:

- Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi;
- Kapasitas dan akses permodalan petani, UMKM, pedagang tradisional dan koperasi belum optimal;
- Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
- Gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan, cenderung meningkat;



- Pengelolaan dan penggalian sumber-sumber PAD belum optimal dan kesadaran masyarakat masih kurang dalam membayar pajak;
- Kualitas lingkungan dan Sumber Daya Alam yang cenderung menurun;
- Kurangnya kesadaran dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
- Tingkat ketidaklulusan siswa masih cukup tinggi;
- Kualitas dan kuantitas guru masih kurang;
- Kondisi fisik Infrastruktur publik belum memadai.

Solusi yang dilakukan adalah dengan menetapkan beberapa prioritas yang merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Tahun 2005-2010 serta RKPD tahun 2009, yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD.

Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2009 adalah :

- a. Dengan diberlakukannya sistem pengelolaan keuangan yang terdesentralisasikan di setiap SKPD maka dituntut kesiapan SDM untuk melaksanakan anggaran pada setiap SKPD. Permasalahan yang dihadapi adalah SDM yang ada belum sepenuhnya siap untuk itu . Oleh karena itu maka solusi yang harus ditempuh adalah dengan memberikan pemahaman kepada setiap jajaran di SKPD bahwa pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban adalah menjadi tanggungjawabnya.

- b. Sistem Informasi keuangan daerah yang merupakan paket SIMKEUDA program dari DEPDAGRI yang belum sinkron dengan kondisi maupun istem dan prosedur yang dilaksanakan di Pemkab Sleman akan menghambat kelancaran pengelolaan keuangan bagi SKPD khususnya terhadap pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- c. Regulasi atau peraturan dari pusat yang tidak jelas dan saling tidak sinkron akan dapat menimbulkan pemahaman yang multi tafsir terutama dengan aparat pemeriksa. Hal ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan. Solusi yang ditempuh adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan dilakukannya pendampingan oleh pihak yang berkompeten.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan *netto* yang merupakan selisih antara Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah tahun 2009 dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai program yang direncanakan pada tahun 2009 melalui peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah pada akurasi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pembiayaan daerah digunakan untuk usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga



diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di samping itu pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran maksimal sebesar 5% dari estimasi pendapatan.

Pembiayaan pengeluaran Tahun 2009 dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal ke BUMD dan BUKP, Penguatan modal kepada masyarakat serta kewajiban-kewajiban yang menjadi prioritas seperti pembayaran pokok pinjaman serta kewajiban lainnya .

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target pembiayaan netto tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Pembiayaan Penerimaan	213.907.757.911,59	213.739.051.142,59	99,92
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	213.907.757.911,59	213.739.051.142,59	99,92
2.	Pembiayaan Pengeluaran	29.938.500.000,00	29.938.244.928,40	100
a.	Penyertaan Modal (Investasi) daerah	23.200.000.000,00	23.200.000.000,00	100
b.	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82
c.	Penguatan Modal	6.600.500.000,00	6.600.500.000,00	100
	Pembiayaan Neto	183.969.257.911,59	183.800.806.214,19	99,91